

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 ini dibuat mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yaitu terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang profesional dan responsif Tahun 2013 – 2018, dimana Rencana Kerja ini merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tupoksinya mempunyai Visi yaitu: Terwujudnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta peningkatan Kesejahteraan Keluarga bagi aparat dan publik. Dengan Misi yaitu: Meningkatkan kapasitas kelembagaan di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (capacity building); Membangun jaringan kerja di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (networking building); Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (public awareness).

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, kami menyadari Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu diharapkan saran dan koreksi dari semua pihak untuk penyempurnaan dan keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini.

Medan, 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROPINSI SUMATERA UTARA

Hj. NURLELA, SH,M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19621023 198602 2 001

**RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

BAB I	:	PENDAHULUAN.....	1
		1. Latar Belakang	1
		2. Landasan Hukum	2
		3. Maksud dan Tujuan	3
		4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	:	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	5
		1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra.....	5
		2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	16
		3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	24
		4. Review terhadap RKPD	25
		5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III	:	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	37
		1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional....	37
		2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD	38
		3. Program dan Kegiatan	40
BAB IV	:	PENUTUP.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Sesuai dengan RPJMD provinsi Sumatera Utara tahun 2013 – 2018 untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara maka salah satu strategi yang perlu dikembangkan adalah peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Untuk itu, sebagai salah satu organisasi pemerintah dalam jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara harus membuat Rencana Kerja Dinas sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya dengan mengenali lingkungan strategis agar dapat menyusun rencana program yang tepat sasaran sebagai bagian dari rangkaian pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pada dasarnya program pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Selama ini pendekatan pembangunan belum secara khusus mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki sehingga hal tersebut turut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Bentuk-bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dikenal dengan kesenjangan gender (*gender gap*) yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan gender (*gender issues*).

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara meliputi pembentukan Tim penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Pejabat dan Staf yang siap bertugas untuk menyusun Rencana Kerja dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Tim penyusunan Rencana Kerja tersebut diberikan pembekalan untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Rencana

Kerja, hubungan Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya serta aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara merupakan pedoman dan acuan bagi aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018.

Berdasarkan RPJMD dan Renstra tersebut kemudian disusun Rencana Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disusun Rencana Kerja Anggaran pada Tahun 2017 melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

1.2. Landasan Hukum

Dasar – dasar dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Undang-undang No. 24 tahun 1956 tentang Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
7. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

8. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
11. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi;
14. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional
15. Inpres Nomor : 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah.
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2003-2018
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 – 2018;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara ini, disamping sebagai alat kendali dan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan, juga untuk memberikan kejelasan dan arah dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan Pemberdayaan Perempuan sebagai bagian dari pembangunan daerah Sumatera Utara dalam 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada bab I Pendahuluan yang berisikan :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Kemudian pada bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu yang memuat yaitu :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bab III berisikan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang memuat tentang :

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

Kemudian pada bab IV berisikan tentang penutup Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BIRO PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN ,ANAK DAN KELUARGA BERENCANA SETDAPROVSU
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN LALU.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu tahun lalu dan realisasi Renstra Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu mengacu pada laporan kinerja tahunan Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu dan/atau realisasi APBD untuk Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu

A. Keberhasilan

Keberhasilan Pelaksanaan Renja Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provsu melalui Program antara lain :

1. Program pelayanan Administrasi perkantoran
 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 3. Program peningkatan disiplin aparatur
 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 7. Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
 8. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
 9. Program Penguatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Berencana
-
1. Terlaksananya operasional rutinitas Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta laporan kinerja dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang ada.
 2. Pembentukan 4 P2TP2A di Kabupaten/Kota yaitu : Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten mandailing Natal dan Kabupaten Karo.

3. Terfasilitasinya 70 korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara.
4. Terjalinnnya kerjasama antara Biro PPAKB SetdaprovSU dengan TP.PKK dalam rangka Desa/Kelurahan Percontohan KDRT dengan pemenang 10 Kabupaten/Kota.
5. Tersusunnya 1 (satu) Pergub Perlindungan Anak Provsu.
6. Terbentuknya 5 (lima) Forum Anak Kab./Kota
7. Terbentuknya 9 (sembilan) Sekretariat PPRG Kab/Kota yaitu : Kabupaten Labuhanbatu Utara, Pak-Pak Bharat, Dairi, Batubara, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhan batu, Simalungun dan Medan.
8. Diterimanya penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya dari Pemerintah Pusat atas Komitmen Pemerintah terhadap Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk 4 Kabupaten/Kota.
9. Terpilihnya 6 (enam) Kabupaten/Kota yang berkomitmen tinggi terhadap Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara.
10. Terfasilitasinya 2 (dua) kelompok UPPKS (Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Tapanuli Utara) yang mengikuti pameran dalam rangka Hari Keluarga Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
11. Terbentuknya 1 (satu) PPKS Kab/Kota yaitu : Kabupaten Padang Lawas.

B. Kendala dan Permasalahan

1. Kurangnya dukungan SKPD dalam mengintegrasikan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) ke dalam RKA-SKPD.
2. Belum adanya data terpilah, sehingga kurang mendukung profil/statistik Gender di Kab/Kota dikarenakan sulitnya mengkoordinasikan permintaan data ke instansi lintas sektor
3. Operasional Tim Koordinasi PUG belum optimal diperankan pada masing-masing satuan kerja.
4. Tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disebabkan antara lain budaya patriarki yang begitu kuat sehingga kasus ini sulit terselesaikan secara tuntas, ditambah lagi data yang ada masih berupa fenomena gunung es, sehingga perlu advokasi pembentukan tim

penanganan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota

5. Percepatan Kab/Kota Layak Anak sangat strategis untuk dikembangkan mengingat masih minimnya sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten/Kota dalam mendukung pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bagi anak sesuai dengan program PNBAI (Program Nasional Bagi Anak Indonesia)
6. Belum optimal kelembagaan Pengarusutamaan Gender yang ada dan sehingga masih dibutuhkan penguatan kelembagaan PUG melalui penghunjukan Pocal Point Gender.
7. Lemahnya koordinasi antar stakeholders dalam penanganan korban trafficking / kekerasan terhadap perempuan ditambah lagi belum adanya sarana rumah aman yang permanen untuk penampungan korban.

Laporan ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang dihimpun pada Tahun Anggaran 2016. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih sangat sederhana sehingga kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat membuat laporan yang lebih baik lagi untuk tahun-tahun yang akan datang. Sembari menunggu koreksi perbaikan, mudah-mudahan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan dan perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu dan
Pencapaian Renstra Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu s/d Tahun 2016
Provinsi Sumatera Utara

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2015	Realisasi Renja SKPD tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2016)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Wajib									
1	Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana									
1	Program pelayanan Administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase Penyediaan jasa surat menyurat	100%	52,71%	100%	71,80%	71,80%	100 %	100 %	100 %
1	Penyediaan jasa administrasi perkantoran/Keuangan	Persentase Penyediaan jasa administrasi perkantoran/Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %

				Penyediaan alat tulis kantor	Persentase Penyediaan alat tulis kantor	100%	98,84%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	96,46%	100%	82,39%	82,39%	100 %	100 %	100 %
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Persentase Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100%	100%	100%	96,90%	96,90%	100 %	100 %	100 %
1				Penyediaan makanan dan minuman	Persentase Penyediaan makanan dan minuman	100%	65%	100%	55,00%	55,00%	100 %	100 %	100 %
1				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Persentase Rapat-rapat dalam dan luar daerah	100%	83,75%	100%	90,57%	90,57%	100 %	100 %	100 %
1				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kelancaran pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan kesejahteraan aparatur								
1				Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Persentase pemeliharaan dan keamanan gedung kantor	100%	96,92%	100%	97,33%	97,33%	100 %	100 %	100 %
1				Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur								
				Perbaikan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah aparatur yang mengalami peningkatan disiplin	32 org		0	0	-	30 org	-	-
1				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur								
1				Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terdidik dan terlatih	24 org	1 Tahun	20 org	14 org	70%	22 org	20 org	100 %

1				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas kinerja pelaporan dan keuangan								
1				Monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja SKPD (LAKIP,LKPJ,LPPD,TAPKIN,Renja dan pelayanan informasi)	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	5 dokumen		5 Dokumen	5 dok	100%	5 Dok	5 Dok	100 %
				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya dukungan kebijakan dan regulasi keberpihakan kepada perempuan								
				Sosialisasi dan advokasi berbagai perundang-undangan, kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Jumlah peserta yang tersosialisasi dan teradvokasi kebijakan terkait peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	150 org	2 kl 100 org	.-	0	-	0	60 org	100 %
1	20	29	4	Rapat Koordinasi kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Jumlah Desa / Kelurahan Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Model Desa Prima).	1 rekomendasi, 3 desa/kelurahan	3 desa/kelurahan 1 rekomendasi	0	0	-	0	1 Rekomendasi, 3 desa/kelurahan	100 %
1	20	30		Kerjasama/kemitraan dengan lintas sektor, lembaga/organisasi perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan	Jumlah perjanjian kerjasama/kemitraan dan advokasi pembentukan P2TP2A bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan tingkat provinsi dan kab/kota.	8 perjanjian, 3 P2TP2A	3 perjanjian, 3 P2TP2A	1 perjanjian, 3 P2TP2A	1 perjanjian, 3 P2TP2A	75%	1 perjanjian, 1 P2TP2A	4 perjanjian, 3 P2TP2A	100 %
1	20	30	1	Koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan, koodinasi, monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas hidup/perlindungan perempuan	33 kab/kota	22 kab/kota	20 kab/kota	20 kab/kota	100%	18 kab/kota	22 kab/kota	100 %

				ke Kabupaten/Kota									
1	20	30	2	Operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Provsu	Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.	1 MoU	1 MoU	1 MoU	0	0%	1 MoU	1 MoU	100 %
1	20	30	3	Pengembangan sarana perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia (trafiking), pornografi dan pornoaksi di tingkat Kab/Kota	Jumlah korban terfasilitasi layanan pengaduan dan perlindungan sementara atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	90 korban	1 tim pendamping, 59 korban	60 korban	85 korban	170%	50 korban	60 korban	100 %
1	20	30	4	Penyusunan/pengembangan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/kebijakan dibidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.	1 kebijakan	1 pergub	-	-	-	1 draf pergub RAP TPPO	1 pergub	100 %
1	20	30	5	Kerjasama dengan TP. PKK dalam rangka pelaksanaan super visi, monitoring dan evaluasi desa/kelurahan percontohan KDRT	Jumlah Desa/Kelurahan pemenang percontohan PKDRT.	10 pemenang desa/kelurahan	33 kab/kota, 7 pemenang	33 kab/kota, 10 pemenang	33 kab/kota, 10 pemenang	100%	10 pemenang desa/kelurahan	10 Desa/kelurahan pemenang	100 %
1	20	30	7	Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak	Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak.								

1	20	3	1	Sosialisasi dan Advokasi peraturan/kebijakan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah peserta sosialisasi dan advokasi	150 org	2 kl 60 orang, 1 dok. Lap.	-	-	-	150 orang	80 org	100 %
1	20	3	1	Penyusunan berbagai kebijakan di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak di Provsu	jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang kesejahteraan dan perlindungan anak tingkat provinsi dan kab/kota.	1 pergub tentang partisipasi anak		3 pergub, 3 MoU	2 pergub	50%	1 pergub tentang KLA, 1 MoU	1 Pergub	100 %
1	20	3	1	Peringatan Hari Anak Provinsi Sumatera Utara.	Jumlah peserta pelaksanaan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Provinsi Sumatera Utara.	500 org		0	0	-	0	500 org	100 %
1	20	3	1	Pembentukan/ Penguatan Forum Anak North Sumatera (FANS)	Jumlah Forum Anak Kab/Kota yang mendapat penguatan	33 forum anak kab/kota	3 forum anak kab/kota	3 forum anak Kab/Kota	3 forum anak Kab/Kota	100%	28 forum anak kab/kota	3 forum anak Kab/Kota	100 %
1	20	3	1	Jambore Anak Provinsi Sumatera Utara	Jumlah peserta pelaksanaan Jambore	450 org	1 kl 300 org	300 org	300 org	100%	450 org	300 org	100 %
1	20	3	1	Rapat Koordinasi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah peserta rapat koordinasi Kesejahteraan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara	66 org	1 kl 66 org kab/kota	66 org kab/kota	66 org kab/kota	100%	50 orang	66 org	100 %
				Operasional Gugus Tugas Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara	Jumlah dokumen/kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak tingkat provinsi dan kab/kota.	1 buku, 1 tim gugus tugas	1 kl 40 org	1 kebijakan. 1 tim gugus tugas	1 kebijakan. 1 tim gugus tugas	100%	1 buku, 1 tim gugus tugas	1 form, 1 tim gugus tugas	
				Koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi	33 kab/kota	27 kab/kota	22 kab/kota	22 kab/kota	100 %	28 kab/kota	24 Kab/Kota	100%
				Kerjasama/kemitraan dan lintas sektor dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak	Jumlah kerjasama kemitraan bidang perlindungan anak Provinsi Sumatera Utara	2 kerjasama	2 kl 80 org	-	0	-	0	2 kerjasama	100%

				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Menguatnya sistem dan mekanisme kelembagaan dan jaringan PUG & PUHA partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta ketersediaan profil gender & Anak di Provinsi Sumatera Utara								
				Penguatan kapasitas dan jaringan kelembagaan PUG di tingkat provinsi dan Kab/kota, termasuk pusat studi wanita	jumlah fasilitator PUG Provinsi	5 fasilitator	2 kl 60 org, 5 fasilitator	5 fasilitator	5 fasilitator	100%	5 fasilitator	5 fasilitator	100%
				Penyusunan berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG	Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang penguatan kelembagaan PUG	1 rencana kerja Pokja PUG, 3 MoU Kab/Kota	6 k 120, 1 program kerja	1 dokumen program kerja,	1 dokumen program kerja,	100%	1 rencana kerja Pokja PUG	1 program kerja	100%
				Rapat koordinasi pelaksanaan PUG percepatan (PPRG) di provinsi sumatera utara	Jumlah Dok. Rekomendasi sekretariat PPRG Kab/Kota	1 rekomendasi untuk 10 sekretariat PPRG Kab/Kota	10 sekretariat PPRG kab/kota	5 sekretariat PPRG Kab/Kota	5 sekretariat PPRG Kab/Kota	100%	1 rekomendasi 9 sekretariat PPRG Kab/Kota	1 Rekomendasi untuk 10 sekretariat PPRG Kab/Kota	100%
				Sosialisasi dan Advokasi peran media dalam penganggulangan pornografi, pornoaksi, trafiking, kekerasan rumah tangga dan kekerasan perempuan	Jumlah Majalah sarana berita wanita (SARITA)	2 edisi, 1000 eks	2 edisi, 1000 eks	0	0	-	0	2 edisi, 1000 eks	100%
				Pembekalan PUG bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain	Jumlah peserta pelaksanaan pembekalan PUG bagi Toga Toma	100 org	1 kl 100 orang, 1 dok. Lap.	100 org, 1 dok lap.	50 org, 1 dok lap.	50%	50 org	100 org	100%

			Evaluasi pembangunan pemberdayaan perempuan melalui strategi PUG Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan bidang pembangunan Pemberdayaan Perempuan melalui strategi PUG	6 Kab/Kota	2 kl 1 form isian, 6 (Provinsi dan kab/kota)	6 kab/kota	0	-	6 kab/kota	6 kab/kota	100%
			Fasilitasi Forum data Gender di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah formulir isian	1 form isian	2 kl 100 org, 1 form sian	0	0	-	0	1 form isian	100%
			Koordinasi, advokasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan, Koordinasi, monitoring dan evaluasi	30 kab/kota	18 kab/kota	22 kab/kota	22 kab/kota	100%	20 kab/kota	18 kab/kota	100%
			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kebijakan peraturan perundang-undnagan tentang perempuan dan anak	Jumlah kegiatan pameran yang diikuti	1 pameran	1 kl 500 org, 1 pameran	1 pameran	1 pameran	100%	1 pameran	1 pameran	100%
			Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan Pengarusutamaan Hak anak (PUHA)	Jumlah dokumen program kerja bidang penguatan kelembagaan PUHA.	1 program kerja		1 Pergub	1 kebijakan	100%	0	1 Pokja PUHA, 1 Pergub	100%
			Program Penguatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Berencana	Meningkatnya kualitas kelembagaan, kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi, pencegahan HIV/AIDS, bahaya penanggulangan NAPZA, pengembangan dan fasilitasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kegiatan promosi, fasilitasi, advokasi, workshop, KIE bagi pemangku kepentingan, dunia usaha/swasta dan								

					masyarakat.								
				Peringatan hari ibu Provinsi Sumatera Utara	Jumlah peserta pelaksanaan Hari Ibu Provinsi Sumatera Utara	900 org	4 keg. 6 pemenang, 1206 org	0	0	-	0	1200 org	100%
				Advokasi, KIE tentang Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Jumlah Kabupaten/Kota yang diadvokasi tentang Gerakan Sayang Ibu	3 GSI kab/kota	2 GSI kab/kota, 2 dok. Laporan	3 GSI kab/kota, 2 dok. Lap	2 GSI kab/kota, 2 dok. Lap	80%	3 GSI kab/kota	3 GSI kab/kota	100%
				Pengembangan cakupan dan kualitas kelompok bina keluarga remaja	Jumlah Kabupaten/Kota yang terinformasi tentang pencegahan HIV/AIDS dan bahaya penanggulangan NAPZA di Provinsi dan Kab/Kota	4 kab/kota	2 kab/kota, 160 org	3 kab/kota	2 kab/kota	80%	2 kab/kota	3 kab/kota	100%
				Pengembangan cakupan dan kualitas UPPKS melalui penyelenggaraan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS	Jumlah Kelompok UPPKS yang mengikuti pameran pada hari keluarga nasional	5 kelompok UPPKS	3 kelompok UPPKS (pameran)	3 kelompok UPPKS (pameran),	2 kelompok UPPKS (pameran),	80%	3 kelompok UPPKS	3 kelompok UPPKS	100%
				Pengembangan dan fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah PPKS yang terbentuk di Kab/Kota	2 jaringan kerjasama	2 PPKS kab/kota	2 PPKS kab/kota,	2 PPKS kab/kota,	100%	1 PPKS kab/kota	2 PPKS Kab/Kota	100%
				Koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi keluarga sejahtera dan berencana di kab/kota	Jumlah Pembinaan, koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kab/Kota	33 kab/kota	22 kab/kota	20 kab/kota	20 kab/kota	100%	15 kab/kota	28 Kab/Kota	100%

2.2. Analisis kinerja Pelayanan SKPD 2016 sebagaimana Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berpedoman kepada Renstra dan RPJMD Tahun 2013-2018 yang selanjutnya dituangkan dalam Renja Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu kemudian ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)	
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan meningkatnya upaya perlindungan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi ditingkat provinsi	1 Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	1 Kebijakan, 1 MoU	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	406.591.000		343.458.297	110 %	84,47 %
				Operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Provsu	38.000.000	1 MoU	28.410.600	100%	74.76 %
				Penyusunan/pengembangan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota	20.000.000	1 draf Pergub	19.700.000	100 %	98,50 %

	dan kab/kota	2	Jumlah layanan pengaduan dan perlindungan sementara atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi	70 korban	- Pengembangan sarana perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia (trafiking), pornografi dan pornoaksi di tingkat Kab/Kota	162.591.000	70 Korban	110.287.997	100 %	67,83 %
		3	Jumlah Desa / Kelurahan Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Model Desa Prima)	3 desa/kelurahan	- Rapat Koordinasi kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	-	-	-	-	-
		4	Jumlah kerjasama/kemitraan di bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan tingkat provinsi dan kab/kota	5 perjanjian kerjasama dengan Kab/Kota, 3 P2TP2A	- Kerjasama/kemitraan dengan lintas sektor, lembaga/organisasi perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan	46.000.000	1 perjanjian kerjasama dengan Kab/Kota, 4P2TP2A	45.061.200	130 %	97,96 %
		5	Jumlah kerjasama dengan TP.PKK dalam rangka pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi desa/kelurahan percontohan KDRT	1 Perjanjian kerjasama, 10 pemenang	- Kerjasama dengan TP. PKK dalam rangka pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi desa/kelurahan percontohan KDRT	140.000.000	1 Perjanjian kerjasama, 10 pemenang	139.998.500	100%	99,74%
	Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak.	1	Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang kesejahteraan dan perlindungan anak tingkat provinsi dan kab/kota	1 (satu) Peraturan Gubernur, 3 (tiga) Mou, 1 (satu) Forum Anak	Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak	618.500.000		500.512.979	100 %	80,92 %
					- Penyusunan berbagai kebijakan di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak di Provsu	65.000.000	1 (satu) Peraturan Gubernur	64.470.050	100 %	99,18 %

				- Pembentukan/ Penguatan Forum Anak North Sumatera (FANS)	493.500.000	1 Forum Anak	386.262.929	100%	78,27 %	
		2	Jumlah kerjasama/kemitraan dibidang perlindungan anak di provinsi dan kab/kota	1 (satu) Tim Gugus Tugas, 2 (dua) kerjasama	- Operasional Gugus Tugas Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara	60.000.000	1 Tim Gugus Tugas	49.780.000	100%	82,97%
					- Kerjasama/kemitraan dan lintas sektor dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak	-	-	-	-	-
3	Menguatnya sistem dan mekanisme kelambagaan dan jaringan PUG & PUHA partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta ketersediaan profil gender & Anak di Provinsi Sumatera Utara	1	Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang penguatan kelembagaan PUG dan PUHA	2 Program Kerja, 3 MoU, 10 Sekretariat PPRG	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	302.000.000		225.872.600		74,53 %
					- Penyusunan berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG	160.000.000	1 dokumen program kerja	97.478.000	100%	60,92 %
					- Rapat koordinasi pelaksanaan PUG percepatan (PPRG) di provinsi sumatera utara	83.000.000	9 Sekretariat PPRG	74.599.600	100%	89,88 %

		Jumlah penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya yg diperoleh di Provinsi Sumatera Utara melalui evaluasi pelaksanaan PUG tingkat Provinsi	Penghargaan : 6 Kab/Kota	- Evaluasi pembangunan pemberdayaan perempuan melalui strategi PUG Provinsi dan Kab/Kota	59.000.000	6 penghargaan Kab/Kota, 5 penghargaan Pusat (Prov dan Kab/Kota)	52.995.000	170 %	89,82 %
4	Meningkatnya kualitas kelembagaan, kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi, pencegahan HIV/AIDS, bahaya penanggulangan NAPZA, pengembangan dan fasilitasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kegiatan promosi, fasilitasi, advokasi, workshop,	1 Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang dibentuk, dan Kelompok UPPKS yang mengikuti Hari Keluarga Nasional	1 PPKS, 4 kelompok UPPKS kab/kota	Program Penguatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Berencana	370.000.000		366.824.854		99,06%
				- Pengembangan cakupan dan kualitas UPPKS melalui penyelenggaraan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS	100.000.000	2 kelompok UPPKS (1 Pameran)	95.330.500	100 %	95,33 %
				- Pengembangan dan fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	70.000.000	1 PPKS kab/kota	67.562.500	100%	96,52%
		2 Jumlah kerjasama/kemitraan dibidang kualitas kelembagaan kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi serta pencegahan HIV/AIDS dan bahaya penanggulangan NAPZA di provinsi dan kab/kota	3 Kelompok GSI Kab/Kota, 4kab/kota HIV/AIDS, NAPZA	- Advokasi, KIE tentang Gerakan Sayang Ibu (GSI)	419.074.000	2 Kelompok GSI Kab/Kota	367.638.000	80%	87,73%
				- Pengembangan cakupan dan kualitas kelompok bina keluarga remaja	79.000.000	2 kab/kota HIV/AIDS, NAPZA	77.440.000	100%	98,03%

**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana SetdaprovSU Tahun 2016
Provinsi Sumatera Utara**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan											
1	- Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan			1 kebijakan, 1 MoU	1 kebijakan/draf Pergub, 1 MoU	1 kebijakan, 1 MoU	1 Kebijakan, 1 MoU	-	1 kebijakan/draf pergub, 1 MoU	1 kebijakan, 1 MoU	1 Kebijakan, 1 MoU	
2	- Jumlah layanan pengaduan dan perlindungan sementara atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi			60 korban	70 korban	80 korban	90 korban	85 korban	70 korban	80 korban	90 korban	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
3	- Jumlah Desa / Kelurahan Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Model Desa Prima)			3 Desa/ Kelurahan	3 Desa/ Kelurahan	3 Desa/ Kelurahan	3 Desa/ Kelurahan	-	-	3Desa/ Kelurahan	3 Desa/ Kelurahan	
4	- Jumlah kerjasama/kemitraan di bidang peningkatan kualitas perlindungan perempuan tingkat provinsi dan kab/kota			- Perjanjian kerjasama dengan : 5 Kab/Kota - Pembentukan 3 P2TP2A	- Perjanjian kerjasama dengan : 5 Kab/Kota - Pembentukan 3 P2TP2A	- Perjanjian kerjasama dengan : 8 Kab/Kota - Pembentukan 3 P2TP2A	- Perjanjian kerjasama dengan : 8 Kab/Kota - Pembentukan 3 P2TP2A	Perjanjian kerjasama dengan : 1 Kab/Kota, Pembentukan 3 P2TP2A	Perjanjian kerjasama dengan : 1 Kab/Kota - Pembentukan 4 P2TP2A	- Perjanjian kerjasama dengan : 8 Kab/Kota - Pembentukan 3 P2TP2A	- Perjanjian kerjasama dengan : 8 Kab/Kota - Pembentukan 3 P2TP2A	
II	Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak											
1	- Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang kesejahteraan dan perlindungan anak tingkat provinsi dan kab/kota			1 Pergub, 3 Mou, 3 Forum Anak	1 Pergub, 3 Mou, 1 Forum Anak	1 Pergub, 1 Mou, 1 Forum Anak	1 Pergub, 33 Forum Anak	2 Pergub, 3 Forum anak	1 Pergub, 1 Mou, 1 Forum Anak	1 Pergub, 1 Mou, 1 Forum Anak	1 Pergub, 33 Forum Anak	
2	- Jumlah kerjasama/kemitraan dibidang perlindungan anak di provinsi dan kab/kota			- Kerjasama / Kemitraan : 1 kl BNN 2 kl LSM - Tim Gugus Tugas	- Kerjasama / Kemitraan : 1 kl BNN, 1 kl LSM Tim Gugus Tugas	- Kerjasama / Kemitraan : 1 kl BNN 2 kl LSM - Tim Gugus Tugas	2 Kerjasama	1 Tim Gugus Tugas	1 Tim Gugus Tugas	- Kerjasama / Kemitraan : 1 kl BNN 2 kl LSM - Tim Gugus Tugas	2 Kerjasama	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
III	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penarusutamaan Hak Anak (PUHA)											
1	- Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang penguatan kelembagaan PUG dan PUHA			1 Pergub, 1 Rencana Kerja Pokja PUG , 10 Sekretariat PPRG.	2 Rencana Kerja Pokja PUG, 10 Sekretariat PPRG, 3 Mou kab/kota,	2 Rencana Kerja Pokja PUG, 10 Sekretariat PPRG 3 Mou kab/kota	1 Rencana Kerja Pokja PUG, 10 Sekretariat PPRG 3 Mou kab/kota	1 Program Kerja, 5 Sekretariat PPRG	1 Rencana Kerja Pokja PUG, 9Sekretariat PPRG	2 Rencana Kerja Pokja PUG, 10 Sekretariat PPRG 3 Mou kab/kota	1 Rencana Kerja Pokja PUG, 10 Sekretariat PPRG 3 Mou kab/kota	
2	- Jumlah penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya yg diperoleh di Provinsi Sumatera Utara melalui evaluasi pelaksanaan PUG tingkat Provinsi			7 Penghargaan : - 6 Kab/Kota - 1 Provinsi	8 Penghargaan : - 7 Kab/Kota - 1 Provinsi	9 Penghargaan : - 8 Kab/Kota - 1 Provinsi	6 Penghargaan : - 5 Kab/Kota - 1 Provinsi	-	11 Penghargaan : - 10 Kab/Kota - 1 Provinsi	9 Penghargaan : 8 Kab/Kota - 1 Provinsi	6 Penghargaan : - 5 Kab/Kota - 1 Provinsi	
IV	Program Penguatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Berencana											
1	- Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga			2 PPKS, 3 kelompok	1 PPKS, 4 kelompok	2 Jaringan kerjasama, 4	2 Jaringan kerjasama ,	2 PPKS, 2 kelompok	1 PPKS Kab/Kota,	2 Jaringan kerjasama, 4	2 Jaringan kerjasama ,	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
	Sejahtera (PPKS) yang dibentuk, dan Kelompok UPPKS yang mengikuti Hari Keluarga Nasional			UPPKS kab/kota	UPPKS kab/kota	kelompok UPPKS kab/kota	5 kelompok UPPKS	UPPKS kab/kota	2 kelompok UPPKS kab/kota (1 Pameran)	kelompok UPPKS kab/kota	5 kelompok UPPKS	
2	- Jumlah kerjasama/kemitraan dibidang kualitas kelembagaan kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi serta pencegahan HIV/AIDS dan bahaya penanggulangan NAPZA di provinsi dan kab/kota			- 3 Kelompok GSI Kab/Kota - 3 kab/kota, HIV/AIDS, NAPZA	- 3 Kelompok GSI Kab/Kota - 4 kab/kota, HIV/AIDS, NAPZA	- 3 Kelompok GSI Kab/Kota - 4 kab/kota, HIV/AIDS, NAPZA	- 3 Kelompok GSI Kab/Kota - 4 kab/kota, HIV/AIDS, NAPZA	2 Kelompok GSI Kab/Kota, 2 kab/kota HIV/AIDS, NAPZA	- 2 Kelompok GSI Kab/Kota - 2 kab/kota, HIV/AIDS, NAPZA	- 3 Kelompok GSI Kab/Kota - 4 kab/kota, HIV/AIDS, NAPZA	- 3 Kelompok GSI Kab/Kota - 4 kab/kota, HIV/AIDS, NAPZA	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana

Isu – isu penting Dalam rangka penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro PPAKB Setdaprovsu antara lain :

- a. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan PP dan PA merupakan urusan wajib, nomenklatur Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Program Pemerintah Pusat yang dipopulerkan melalui Three Ends yaitu:
 - Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
 - Akhiri Perdagangan Manusia
 - Akhiri Kesenjangan Ekonomi
- c. Belum semua SKPD dan Non Pemerintah menganggap Pengarusutamaan Gender sebagai strategi prioritas dalam pembangunan karena selama ini dianggap PUG merupakan program untuk perempuan.
- d. Perencana program/kegiatan di SKPD belum responsif gender
- e. Kemiskinan perempuan dan laki-laki seringkali dianggap sama, sehingga penanganan kemiskinan kurang memperhatikan perempuan, kemiskinan perempuan dan laki-laki memiliki dimensi yang berbeda, dampaknya perempuan dari keluarga miskin semakin kurang mendapat akses pada sumber daya pembangunan
- f. Tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak
- g. Rendahnya, kualitas hidup perempuan (Pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, Politik, Lingkungan dan sosial budaya)
- h. Rendahnya akses, partisipasi dan sumberdaya perempuan dalam pembangunan.
- i. Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) belum menjadi arus utama dalam pembangunan
- j. Eksploitasi anak tujuan komersil
- k. Anak yang bermasalah dengan hukum
- l. Percepatan Kab/Kota Layak Anak
- m. Partisipasi pria dalam program keluarga berencana
- n. Kesehatan Reproduksi
- o. Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera

2. 4. Review terhadap RKPD

Review terhadap RKPD tahun 2017 Provinsi Sumatera Utara

Nama SKPD : Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Program pelayanan Administrasi perkantoran		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	165.000.000	Program pelayanan Administrasi perkantoran		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	433.750.000	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	BIRO PPAKB	Persentase Penyediaan jasa surat menyurat	100%	4.500.000	Penyediaan jasa surat menyurat	BIRO PPAKB	Persentase Penyediaan jasa surat menyurat	100 %	4.500.000	
2	Penyediaan jasa administrasi perkantoran/Keuangan	BIRO PPAKB	Persentase Penyediaan jasa administrasi perkantoran/Keuangan	100%	1.500.000	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	BIRO PPAKB	Persentase Penyediaan jasa administrasi perkantoran/Keuangan	100 %	131.250.000	Honorarium Pengelola kegiatan ditampung di rekening ini
3	Penyediaan alat tulis kantor	BIRO PPAKB	Persentase Penyediaan alat tulis kantor	100%	46.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	BIRO PPAKB	Persentase Penyediaan alat tulis kantor	100 %	75.000.000	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BIRO PPAKB	Persentase Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	23.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BIRO PPAKB	Persentase Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	23.000.000	
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	BIRO PPAKB	Persentase Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100%	4.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	BIRO PPAKB BIRO PPAKB	Persentase Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100 %	4.000.000	

6	Penyediaan makanan dan minuman	BIRO PPAKB	Persentase Penyediaan makanan dan minuman	100%	6.000.000	Penyediaan makanan dan minuman		undangan Persentase Penyediaan makanan dan minuman	100 %	6.000.000	
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BIRO PPAKB	Persentase Rapat-rapat dalam dan luar daerah	100%	80.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BIRO PPAKB	Persentase Rapat-rapat dalam dan luar daerah	100 %	190.000.000	
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BIRO PPAKB	Meningkatnya kelancaran pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan kesejahteraan aparatur	1 Tahun	220.000.000	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BIRO PPAKB	Meningkatnya kelancaran pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan kesejahteraan aparatur	1 Tahun	9.500.000	
1	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	BIRO PPAKB	Persentase pemeliharaan dan keamanan gedung kantor	100%	220.000.000	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	BIRO PPAKB	Persentase pemeliharaan dan keamanan gedung kantor	100 %	9.500.000	
III	Program peningkatan disiplin aparatur	BIRO PPAKB	Meningkatnya disiplin aparatur	1 Tahun	110.000.000	Program peningkatan disiplin aparatur	BIRO PPAKB	Meningkatnya disiplin aparatur	1 Tahun	20.000.000	
1	Perbaikan fisik dan mental aparatur	BIRO PPAKB	Jumlah aparatur yang mengalami peningkatan disiplin	32 org	110.000.000	Perbaikan fisik dan mental aparatur	BIRO PPAKB	Jumlah aparatur yang mengalami peningkatan disiplin	30 org	20.000.000	
IV	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	BIRO PPAKB	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur	1 Tahun	110.000.000	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	BIRO PPAKB	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur	1 Tahun	20.000.000	
1	Pendidikan dan pelatihan formal	BIRO PPAKB	Jumlah aparatur yang terdidik dan terlatih	22 org	110.000.000	Pendidikan dan pelatihan formal	BIRO PPAKB	Jumlah aparatur yang terdidik dan terlatih	22 org	20.000.000	

V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BIRO PPAKB	Meningkatnya kualitas kinerja pelaporan dan keuangan	1 Tahun	165.000.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BIRO PPAKB	Meningkatnya kualitas kinerja pelaporan dan keuangan	1 Tahun	85.900.000	
1	Monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja SKPD (LAKIP,LKPJ,LPPD,T APKIN,Renja dan pelayanan informasi)	BIRO PPAKB	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	5 dokumen	165.000.000	Monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja SKPD (LAKIP,LKPJ,LPPD,TAPKIN,Renja dan pelayanan informasi)	BIRO PPAKB	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	5 Dok	85.900.000	
VI	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	BIRO PPAKB	Meningkatnya dukungan kebijakan dan regulasi keberpihakan kepada perempuan		888.000.000	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	BIRO PPAKB	Meningkatnya dukungan kebijakan dan regulasi keberpihakan kepada perempuan		888.000.000	
1	Sosialisasi dan advokasi berbagai perundang-undangan, kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan		Jumlah peserta yang tersosialisasi dan teradvokasi kebijakan terkait peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	150 org	88.000.000	Sosialisasi dan advokasi berbagai perundang-undangan, kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan		Jumlah peserta yang tersosialisasi dan teradvokasi kebijakan terkait peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	150 org	88.000.000	
2	Rapat Koordinasi kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Medan, Kab/Kota	Jumlah Desa / Kelurahan Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Model Desa Prima).	1 rekomendasi, 3 desa/kelurahan	70.000.000	Rapat Koordinasi kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Medan, Kab/Kota	Jumlah Desa / Kelurahan Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Model Desa Prima).	1 rekomendasi 3 desa/kelurahan	70.000.000	

3	Kerjasama/kemitraan dengan lintas sektor, lembaga/organisasi perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan	Medan	Jumlah perjanjian kerjasama/kemitraan dan advokasi pembentukan P2TP2A bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan tingkat provinsi dan kab/kota.	3 perjanjian, 3 P2TP2A	115.000.000	Kerjasama/kemitraan dengan lintas sektor, lembaga/organisasi perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan	Medan	Jumlah perjanjian kerjasama/kemitraan dan advokasi pembentukan P2TP2A bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan tingkat provinsi dan kab/kota.	3 perjanjian, 3 P2TP2A	115.000.000	
4	Koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.	Medan dan Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas hidup/perlindungan perempuan	25 kab/kota	110.000.000	Koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.	Medan dan Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas hidup/perlindungan perempuan	25 kab/kota	110.000.000	
5	Operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Provsu	kab/kota	Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.	1 MoU	110.000.000	Operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Provsu	kab/kota	Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.	1 MoU	110.000.000	
6	Pengembangan sarana perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia	Medan	Jumlah korban terfasilitasi layanan pengaduan dan perlindungan sementara atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	70 korban	180.000.000	Pengembangan sarana perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan	Medan	Jumlah korban terfasilitasi layanan pengaduan dan perlindungan sementara atas kasus kekerasan terhadap	70 korban	180.000.000	

	(trafiking), pornografi dan pornoaksi di tingkat Kab/Kota					terhadap perempuan, perdagangan manusia (trafiking), pornografi dan pornoaksi di tingkat Kab/Kota		perempuan dan anak.			
7	Penyusunan/pengembangan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Medan	Jumlah dokumen/kebijakan dibidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.	1 draf pergubsu RAP TPPO	20.000.000	Penyusunan/pengembangan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Medan	Jumlah dokumen/kebijakan dibidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.	1 draf pergub RAP TPPO	20.000.000	
8	Kerjasama dengan TP. PKK dalam rangka pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi desa/kelurahan percontohan KDRT	Medan	Jumlah Desa/Kelurahan pemenang percontohan PKDRT.	10 pemenang desa/kelurahan	195.000.000	Kerjasama dengan TP. PKK dalam rangka pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi desa/kelurahan percontohan KDRT	Medan	Jumlah Desa/Kelurahan pemenang percontohan PKDRT.	10 pemenang desa/kelurahan	195.000.000	
VI	Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak	Kab/Kota	Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak.	15 kl, 1520 orang. 30 kab/kota	842.000.000	Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak	Kab/Kota	Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak.		1.380.978.000	

1	Sosialisasi dan Advokasi peraturan/kebijakan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Utara		Jumlah peserta sosialisasi dan advokasi	150 org	50.000.000	Sosialisasi dan Advokasi peraturan/kebijakan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Utara		Jumlah peserta sosialisasi dan advokasi	150 orang	106.800.000	
2	Penyusunan berbagai kebijakan di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak di Provsu	Medan, Kab/Kota	jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang kesejahteraan dan perlindungan anak tingkat provinsi dan kab/kota.	1 pergub tentang KLA, 3 MoU	65.000.000	Penyusunan berbagai kebijakan di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak di Provsu	Medan, Kab/Kota	jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang kesejahteraan dan perlindungan anak tingkat provinsi dan kab/kota.	1 pergub tentang KLA, 1 MoU	496.690.000	Recruitment Komisioner KPAID
3	Peringatan Hari Anak Provinsi Sumatera Utara.	Medan	Jumlah peserta pelaksanaan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Provinsi Sumatera Utara.	500 org	177.000.000	Peringatan Hari Anak Provinsi Sumatera Utara.	Medan	Jumlah peserta pelaksanaan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Provinsi Sumatera Utara.	500 org	100.000.000	
4	Pembentukan/ Penguatan Forum Anak North Sumatera (FANS)	Medan	Jumlah Forum Anak Kab/Kota yang mendapat penguatan	28 forum anak kab/kota	138.000.000	Pembentukan/ Penguatan Forum Anak North Sumatera (FANS)	Medan	Jumlah Forum Anak Kab/Kota yang mendapat penguatan	28 forum anak kab/kota	210.000.000	
5	Jambore Anak Provinsi Sumatera Utara	Medan	Jumlah peserta pelaksanaan Jambore	450 org	155.000.000	Jambore Anak Provinsi Sumatera Utara	Medan	Jumlah peserta pelaksanaan Jambore	450 org	175.000.000	
6	Rapat Koordinasi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara	Medan	Jumlah peserta rapat koordinasi Kesejahteraan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara	66 org	55.000.000	Rapat Koordinasi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara	Medan	Jumlah peserta rapat koordinasi Kesejahteraan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara	66 org	67.625.000	

7	Operasional Gugus Tugas Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara	Medan	Jumlah dokumen/kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak tingkat provinsi dan kab/kota.	1 buku, 1 tim gugus tugas	60.000.000	Operasional Gugus Tugas Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara	Medan	Jumlah dokumen/kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak tingkat provinsi dan kab/kota.	1 buku, 1 tim gugus tugas	73.858.000	
8	Koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Utara	Medan	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi	28 kab/kota	92.000.000	Koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Utara	Medan	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi	28 kab/kota	100.510.000	
9	Kerjasama/kemitraan dan lintas sektor dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak	Kab/kota	Jumlah kerjasama kemitraan bidang perlindungan anak Provinsi Sumatera Utara	2 kerjasama	50.000.000	Kerjasama/kemitraan dan lintas sektor dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak	Kab/kota	Jumlah kerjasama kemitraan bidang perlindungan anak Provinsi Sumatera Utara	2 kerjasama	50.495.000	
VII	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Medan, Kab/Kota	Menguatnya sistem dan mekanisme kelembagaan dan jaringan PUG & PUHA partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta ketersediaan profil gender & Anak di Provinsi Sumatera Utara		1.164.000.000	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Medan, Kab/Kota	Menguatnya sistem dan mekanisme kelembagaan dan jaringan PUG & PUHA partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta ketersediaan profil gender & Anak di Provinsi Sumatera Utara		975.000.000	

1	Penguatan kapasitas dan jaringan kelembagaan PUG di tingkat provinsi dan Kab/kota, termasuk pusat studi wanita		jumlah fasilitator PUG Provinsi	5 fasilitator	100.000.000	Penguatan kapasitas dan jaringan kelembagaan PUG di tingkat provinsi dan Kab/kota, termasuk pusat studi wanita		jumlah fasilitator PUG Provinsi	5 fasilitator	50.000.000	
2	Penyusunan berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG	Medan	Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang penguatan kelembagaan PUG	1 rencana kerja Pokja PUG	100.000.000	Penyusunan berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG	Medan	Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang penguatan kelembagaan PUG	1 rencana kerja Pokja PUG	210.000.000	
3	Rapat koordinasi pelaksanaan PUG percepatan (PPRG) di provinsi sumatera utara	Medan	Jumlah Dok. Rekomendasi sekretariat PPRG Kab/Kota	1 rekomendasi untuk 10 sekretariat PPRG Kab/Kota	210.000.000	Rapat koordinasi pelaksanaan PUG percepatan (PPRG) di provinsi sumatera utara	Medan	Jumlah Dok. Rekomendasi sekretariat PPRG Kab/Kota	1 rekomendasi 10 sekretariat PPRG Kab/Kota	150.000.000	
4	Sosialisasi dan Advokasi peran media dalam penganggulangan pornografi, pornoaksi, trafiking, kekerasan rumah tangga dan kekerasan perempuan	Medan	Jumlah Majalah sarana berita wanita (SARITA)	2 edisi, 1000 eks	150.000.000	Sosialisasi dan Advokasi peran media dalam penganggulangan pornografi, pornoaksi, trafiking, kekerasan rumah tangga dan kekerasan perempuan	Medan	Jumlah Majalah sarana berita wanita (SARITA)	2 edisi, 1000 eks	130.000.000	
5	Pembekalan PUG bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain	Medan	Jumlah peserta pelaksanaan pembekalan PUG bagi Toga Toma	100 org	115.000.000	Pembekalan PUG bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain	Medan	Jumlah peserta pelaksanaan pembekalan PUG bagi Toga Toma	100 org	35.000.000	

6	Evaluasi pembangunan pemberdayaan perempuan melalui strategi PUG Provinsi dan Kab/Kota	Medan	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan bidang pembangunan Pemberdayaan Perempuan melalui strategi PUG	6 Kab/Kota	120.000.000	Evaluasi pembangunan pemberdayaan perempuan melalui strategi PUG Provinsi dan Kab/Kota	Medan	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan bidang pembangunan Pemberdayaan Perempuan melalui strategi PUG	6 kab/kota	100.000.000	
7	Fasilitasi Forum data Gender di Provinsi Sumatera Utara	Medan, kab/kota	Jumlah formulir isian	1 form isian	104.000.000	Fasilitasi Forum data Gender di Provinsi Sumatera Utara	Medan, kab/kota	Jumlah formulir isian	1 form isian	70.000.000	
8	Koordinasi, advokasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota	Medan	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan, Koordinasi, monitoring dan evaluasi	22 kab/kota	120.000.000	Koordinasi, advokasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota	Medan	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan, Koordinasi, monitoring dan evaluasi	22 kab/kota	120.000.000	
9	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kebijakan peraturan perundang-undnagan tentang perempuan dan anak	kab/Kota	Jumlah kegiatan pameran yang diikuti	1 pameran	110.000.000	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kebijakan peraturan perundang-undnagan tentang perempuan dan anak	kab/Kota	Jumlah kegiatan pameran yang diikuti	1 pameran	75.000.000	

10	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan Pengarusutamaan Hak anak (PUHA)	Medan	Jumlah dokumen program kerja bidang penguatan kelembagaan PUHA.	1 program kerja	35.000.000	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan Pengarusutamaan Hak anak (PUHA)	Medan	Jumlah dokumen program kerja bidang penguatan kelembagaan PUHA.	1 program kerja	35.000.000
VIII	Program Penguatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Berencana	Medan	Meningkatnya kualitas kelembagaan, kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi, pencegahan HIV/AIDS, bahaya penanggulangan NAPZA, pengembangan dan fasilitasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kegiatan promosi, fasilitasi, advokasi, workshop, KIE bagi pemangku kepentingan, dunia usaha/swasta dan masyarakat.	18 kl, 1480 orang 29 kab/kota	1.100.000.000	Program Penguatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Berencana	Medan	Meningkatnya kualitas kelembagaan, kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi, pencegahan HIV/AIDS, bahaya penanggulangan NAPZA, pengembangan dan fasilitasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kegiatan promosi, fasilitasi, advokasi, workshop, KIE bagi pemangku kepentingan, dunia usaha/swasta dan masyarakat.		1.099.890.000
1	Peringatan hari ibu Provinsi Sumatera Utara		Jumlah peserta pelaksanaan Hari Ibu Provinsi Sumatera Utara	900 org	220.000.000	Peringatan hari ibu Provinsi Sumatera Utara		Jumlah peserta pelaksanaan Hari Ibu Provinsi Sumatera Utara	900 org	175.000.000

2	Advokasi, KIE tentang Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Medan	Jumlah Kabupaten/Kota yang diadvokasi tentang Gerakan Sayang Ibu	3 GSI kab/kota	175.000.000	Advokasi, KIE tentang Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Medan	Jumlah Kabupaten/Kota yang diadvokasi tentang Gerakan Sayang Ibu	3 GSI kab/kota	200.000.000
3	Pengembangan cakupan dan kualitas kelompok bina keluarga remaja	kab/kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang terinformasi tentang pencegahan HIV/AIDS dan bahaya penanggulangan NAPZA di Provinsi dan Kab/Kota	4 kab/kota	160.000.000	Pengembangan cakupan dan kualitas kelompok bina keluarga remaja	kab/kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang terinformasi tentang pencegahan HIV/AIDS dan bahaya penanggulangan NAPZA di Provinsi dan Kab/Kota	4 kab/kota	180.000.000
4	Pengembangan cakupan dan kualitas UPPKS melalui penyelenggaraan pendampingan/magan g bagi para kader/anggota kelompok UPPKS	Kab/kota	Jumlah Kelompok UPPKS yang mengikuti pameran pada hari keluarga nasional	4 kelompok UPPKS	250.000.000	Pengembangan cakupan dan kualitas UPPKS melalui penyelenggaraan pendampingan/m agang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS	Kab/kota	Jumlah Kelompok UPPKS yang mengikuti pameran pada hari keluarga nasional	4 kelompok UPPKS	250.000.000
5	Pengembangan dan fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab/kota dan luar provinsi	Jumlah PPKS yang terbentuk di Kab/Kota	1 PPKS kab/kota	145.000.000	Pengembangan dan fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab/kota dan luar provinsi	Jumlah PPKS yang terbentuk di Kab/Kota	1 PPKS kab/kota	145.000.000
6	Koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi keluarga sejahtera dan berencana di kab/kota	Medan kab/kota	Jumlah Pembinaan, koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kab/Kota	30 kab/kota	150.000.000	Koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi keluarga sejahtera dan berencana di kab/kota	Medan kab/kota	Jumlah Pembinaan, koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kab/Kota	30 kab/kota	149.890.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017 Provinsi Sumatera Utara

Nama SKPD : Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Fasilitasi pembekalan fasilitator PPRG bagi SKPD dalam rangka percepatan penyusunan ARG	Kab. Nias	Jumlah Fasilitator PPRG SKPD yang terlatih dalam rangka percepatan penyusunan ARG.	Rp. 150.000.000	APBD
	Fasilitasi Advokasi penyusunan data terpilah gender dan anak dalam mendukung pelaksanaan ARG	Kab. Nias	Jumlah data terpilah gender dan anak dalam mendukung pelaksanaan ARG	Rp. 100.000.000	APBD
	Fasilitasi penguatan kelembagaan P2TP2A dalam bentuk operasional gugus tugas	Kab. Nias	Jumlah kelembagaan P2TP2A dalam bentuk operasional gugus tugas	Rp. 100.000.000	APBD
	Fasilitasi penguatan forum anak dalam mendukung pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kab. Nias	Jumlah forum anak dalam mendukung pelaksanaan Kabupaten Layak Anak	Rp. 170.000.000	APBD
	Fasilitasi pembentukan Pokja Gerakan Sayang Ibu (GSI) dalam mendukung ketahanan keluarga.	Kab. Nias	Jumlah Pokja gerakan sayang ibu (GSI) yang dibentuk dalam rangka mendukung ketahanan Keluarga	Rp. 50.000.000	APBD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Penelaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
I	<p>1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p> <p>Sasaran :</p> <p>A. Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan di berbagai bidang.</p> <p><i>Indikator :</i></p> <p>1) <i>Jumlah kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</i></p> <p>2) <i>Jumlah K/L dan Pemda Provinsi yang melaksanakan PUG</i></p> <p>3) <i>Jumlah Ormas dan dunia usaha yang melaksanakan Pemberdayaan Perempuan</i></p> <p>B. Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan</p> <p><i>Indikator:</i></p> <p>1) <i>Prevalensi kekerasan terhadap perempuan</i></p> <p>2) <i>Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan</i></p> <p>3) <i>Menurunnya AKI</i></p> <p>C. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan</p> <p><i>Indikator :</i></p> <p><i>Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan</i></p>	Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019	Program/Kegiatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
II			

<p>2. Perlindungan Anak Sasaran : A. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus Indikator : 1) <i>Jumlah kebijakan pemenuhan hak anak Perempuan</i> 2) <i>Jumlah K/L dan Pemda Provinsi yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak</i> 3) <i>Jumlah Ormas dan dunia usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak</i> 4) <i>Jumlah kelembagaan pemenuhan hak anak</i> B. Meningkatnya perlindungan khusus anak Indikator : a. <i>Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak</i> b. <i>Jumlah K/L dan Pemda Provinsi yang melaksanakan kebijakan perlindungan khusus anak</i> c. <i>Jumlah Ormas dan dunia usaha yang melaksanakan kebijakan perlindungan khusus anak</i> d. <i>Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak</i></p> <p>3. Sistem Data Gender dan Anak Sasaran : Meningkatnya ketersediaan sistem data gender dan anak Indikator : 1) <i>Jumlah kebijakan sistem data gender dan anak</i> 2) <i>Jumlah sistem data gender dan anak</i> 3) <i>Jumlah promosi dan publikasi di media massa dan media komunikasi lainnya</i></p>		
---	--	--

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu.

Tujuan :

1. Meningkatnya kemampuan lembaga pemerintahan dan non pemerintah dalam melaksanakan PUG, perlindungan anak .
2. Meningkatnya potensi diri sumber daya aparat tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak.
3. Meningkatnya sistem data informasi gender dan anak .

Sasaran :

Untuk mencapai tujuan yang diuraikan diatas, maka perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan yang harus dilakukan agar tujuan tersebut dapat dicapai yaitu :

1. Pembentukan dan pembinaan terhadap pemerintah dan non pemerintah yang peduli terhadap gender dan anak .
2. Peningkatan kondisi dan posisi perempuan terhadap kesehatan, pendidikan dan ekonomi

3.3 . PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Provinsi Sumatera Utara.

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	
1		Urusan Wajib									
1	11	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			12.000.000.000				15.756.000.000		
I		Program pelayanan Administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Dinas dan PA	PP	1.790.000.000			2.148.000.000		
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Dinas dan PA	PP	12 bulan	25.000.000	APBD	100%	30.000.000	APBD
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Dinas dan PA	PP	12 bulan	100.000.000	APBD	100%	120.000.000	APBD
		3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas dan PA	PP	1 tahun	50.000.000	APBD	100%	60.000.000	APBD
		4 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/keuangan	Terlaksananya penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Dinas dan PA	PP	12 bulan	350.000.000	APBD	100%	420.000.000	APBD
		5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas dan PA	PP	12 bulan	120.000.000	APBD	100%	144.000.000	APBD
		6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	Dinas dan PA	PP	1 tahun	50.000.000	APBD	100%	60.000.000	APBD
		7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	Dinas dan PA	PP	1 tahun	150.000.000	APBD	100%	180.000.000	APBD
		8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas dan PA	PP	1 tahun	85.000.000	APBD	100%	102.000.000	APBD

			9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas dan PA	PP	1 tahun	60.000.000	APBD		100%	72.000.000	APBD	
			10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas dan PA	PP	300 eks	50.000.000	APBD		100%	60.000.000	APBD	
			11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat	Dinas dan PA	PP	1 tahun	75.000.000	APBD		100%	90.000.000	APBD	
			12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya biaya mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas dan PA	PP	1 tahun	200.000.000	APBD		100%	240.000.000	APBD	
			13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Tersedianya biaya mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Dinas dan PA	PP	1 tahun	150.000.000	APBD		100%	180.000.000	APBD	
			14	Penyediaan Jasa Pengamanan	Tersedianya jasa pengamanan	Dinas dan PA	PP	1 tahun	150.000.000	APBD		100%	180.000.000	APBD	
			15	Penyediaan Kegiatan Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya pendukung Pengadaan dan pemeriksaan barang/jasa berjalan lancar	Dinas dan PA	PP	12 bulan	100.000.000	APBD		100%	120.000.000	APBD	
			16	Penyediaan Jasa Dokumentasi	Tersedianya jasa dokumentasi	Dinas dan PA	PP	1 tahun	25.000.000	APBD		100%	30.000.000	APBD	
			17	Pelaksanaan Forum SKPD	Terlaksananya Forum SKPD	Dinas dan PA	PP	1 kegiatan	50.000.000	APBD		100%	60.000.000	APBD	
II				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kelancaran pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan kesejahteraan aparatur				1.330.000.000				1.596.000.000		
			1	Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Dinas dan PA	PP	3 Unit	1.000.000.000	APBD			7 Unit	1.200.000.000	APBD
			2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya fasilitas pendukung dalam kelancaran pekarjaan	Dinas dan PA	PP	1 Tahun	150.000.000	APBD			1 Tahun	180.000.000	APBD
			3	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Dinas dan PA	PP	1 Tahun	100.000.000	APBD			1 Tahun	120.000.000	APBD
			4	Pembuatan Papan Nama Instansi Pemprov	Jumlah papan nama Instansi	Dinas dan PA	PP	4 Unit	30.000.000	APBD			1 Unit	36.000.000	APBD
			5	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas dan PA	PP	1 Tahun	50.000.000	APBD			1 Tahun	60.000.000	APBD
III				Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur				150.000.000					180.000.000	

		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas dan PA	PP	1 Tahun	100.000.000	APBD		50 unit	120.000.000	APBD
		2	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi	Dinas dan PA	PP	1 Unit	50.000.000	APBD		50 unit	60.000.000	APBD
IV			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur				75.000.000				90.000.000	
		1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terdidik dan terlatih	Dinas dan PA	PP	35 orang	75.000.000	APBD		35 orang	90.000.000	APBD
V			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas kinerja pelaporan dan keuangan				100.000.000				120.000.000	
		1	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA SKPD	Dinas dan PA	PP	1 laporan	50.000.000	APBD		1 laporan	60.000.000	APBD
		2	Penyusunan Laporan Aset Tetap Per 30 Juni dan Laporan Aset Tetap Per 30 Desember	Jumlah laporan aset tetap per 30 juni dan 31 desember	Dinas dan PA	PP	1 laporan	50.000.000	APBD		1 laporan	60.000.000	APBD
VI			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya dukungan kebijakan dan regulasi keberpihakan kepada perempuan				1.825.000.000	APBD			3.546.000.000	APBD
1		1	Penyusunan berbagai kebijakan terkait dengan peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga di Sumatera Utara	Jumlah Dokumen/Kebijakan terkait dengan peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga di Sumatera Utara	Medan		3 kebijakan	200.000.000	APBD		3 kebijakan	240.000.000	APBD
2		2	Penguatan forum koordinasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga	Jumlah forum koordinasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga	Medan		1 forum	50.000.000	APBD		1 forum	60.000.000	APBD
4		3	Advokasi KIE tentang Gerakan Sayang Ibu	Jumlah rangkaian kegiatan advokasi KIE tentang Gerakan Sayang Ibu	Medan		2 kegiatan	350.000.000	APBD		4 kegiatan	420.000.000	APBD
5		4	Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan	Jumlah SKPD Provinsi dan Kab./Kota yang mendapat penghargaan	Medan Kab./Kota		3 SKPD 6 Kab./Kota	75.000.000	APBD		3 SKPD 6 Kab./Kota	90.000.000	APBD

			Perindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara dan Kab./Kota									
6		5	Penguatan kapasitas dan jaringan pelembagaan pengarusutamaan gender	Jumlah organisasi/lembaga/Pusat Studi pengarusutamaan gender yang diberi penguatan	Medan	30 Lembaga/Organisasi/Pusat Studi	100.000.000	APBD		40 Lembaga/Organisasi/Pusat Studi	120.000.000	APBD
		6	Pembinaan dan evaluasi kebijakan pelaksanaan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	Jumlah Kab./Kota yang dibina dan dievaluasi	kab/kota	1 Tahun	100.000.000	APBD		33 kab/kota	120.000.000	APBD
		7	Sosialisasi dan advokasi berbagai perundang-undangan, kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga	Jumlah peserta yang tersosialisasi dan teradvokasi kebijakan terkait peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga	Provinsi & Kab/Kota	100 orang	100.000.000	APBD		300 orang	120.000.000	APBD
		8	Kerjasama/kemitraan dengan lintas sektor, lembaga/organisasi perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga	Jumlah Kerjasama/kemitraan dengan lintas sektor, lembaga/organisasi perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga	Kab/Kota	3 kerjasama	250.000.000	APBD		3 kerjasama	300.000.000	APBD
		9	Pemberdayaan Ekonomi dan Pendampingan bagi Perempuan Kepala Keluarga dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga	Jumlah perempuan keluarga yang memperoleh pemberdayaan ekonomi dan pendampingan	Provinsi & Kab/Kota	50 orang	250.000.000	APBD		160 orang	300.000.000	APBD
		10	Pembekalan Politik bagi lembaga masyarakat, toga dan toma dalam rangka pemberdayaan perempuan di bidang politik dan hukum	Jumlah peserta Pembekalan Politik bagi lembaga masyarakat, toga dan toma dalam rangka pemberdayaan perempuan di bidang politik dan hukum	Medan	100 orang	150.000.000	APBD		150 orang	180.000.000	APBD
		11	Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga TKI (Bina Keluarga TKI)	Jumlah keluarga TKI yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pembinaan	Provinsi dan Kab/Kota	100 Orang	100.000.000	APBD		70 orang	120.000.000	APBD

		12	Sosialisasi dan advokasi PPRG dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga	Jumlah peserta Sosialisasi dan advokasi PPRG dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga	Medan	100 orang	100.000.000	APBD			120.000.000	APBD
VII			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Menguatnya sistem dan mekanisme kelembagaan dan jaringan PUG & PUHA partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta ketersediaan profil gender & Anak di Provinsi Sumatera Utara			1.010.000.000				1.212.000.000	
2		1	Penyusunan berbagai kebijakan terkait data, informasi gender dan anak	Tersusunnya berbagai kebijakan terkait data, informasi gender dan anak	Provinsi	1 kebijakan	120.000.000	APBD		1 kebijakan	144.000.000	APBD
3		2	Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang data, informasi gender dan anak	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang data, informasi gender dan anak	kab/kota	20 kab/kota	100.000.000	APBD		30 kab/kota	120.000.000	APBD
4		3	Fasilitasi pengumpulan, penyajian data, informasi gender dan anak melalui media massa	Jumlah forum pengumpulan, penyajian data, informasi gender dan anak melalui media massa	Medan	2 forum	120.000.000	APBD		1 kegiatan	144.000.000	APBD
5		4	KIE tentang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah KIE tentang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui PRSU	Medan	1 pameran	120.000.000	APBD		1 kegiatan	144.000.000	APBD
7		5	Pembuatan profil gender, KLA, P2TP2A dan anak di provsu	Jumlah profil gender di provsu	Medan	1 profil	100.000.000	APBD		1 Dokumen	120.000.000	APBD
		6	Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Jumlah Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Provinsi	1 Unit	200.000.000	APBD		1 Tahun	240.000.000	APBD
		7	Rapat koordinasi tentang data, informasi gender dan anak di provsu	Jumlah peserta Rapat koordinasi tentang data, informasi gender dan anak di provsu	Provinsi	99 orang	150.000.000	APBD		150 orang	180.000.000	APBD
8		8	Fasilitasi sarana dan prasarana sistem data	Jumlah Fasilitasi sarana dan prasarana sistem data dan	Medan	10 sarana	100.000.000	APBD		1 sarana	120.000.000	APBD

			dan informasi	informasi								
VIII			Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak	Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak.			5.720.000.000				6.864.000.000	
1		1	Penyusunan Berbagai Kebijakan di Bidang pemenuhan hak Anak di Sumatera Utara.	Jumlah Dokumen/Kebijakan daerah di Bidang pemenuhan hak anak di Provinsi.	Provinsi	1 Dokumen	120.000.000	APBD		1 Dokumen	144.000.000	APBD
2		2	Sosialisasi dan Advokasi Peraturan/ Kebijakan terkait bidang pemenuhan hak Anak di Sumatera Utara.	Jumlah peserta Sosialisasi dan Advokasi Peraturan/ Kebijakan terkait bidang pemenuhan hak Anak di Sumatera Utara.	Provinsi	100 orang	120.000.000	APBD		100 orang	144.000.000	APBD
3		3	Rapat Koordinasi tentang Pemenuhan Hak dan di Provinsi Sumatera Utara.	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Sumatera Utara.	Provinsi	100 orang	120.000.000	APBD		100 orang	144.000.000	APBD
		4	Sosialisasi dan advokasi tentang Kespro, HIV/AIDS dan NAPZA bagi remaja	meningkatnya pemahaman dan wawasan tentang Kespro, HIV/AIDS dan NAPZA	Provinsi dan Kab/Kota	100 Orang	100.000.000	APBD		100 Orang	120.000.000	APBD
		5	Kerjasama/Kemitraan Lintas Sektor/ LSM/Dunia Usaha di bidang Pemenuhan Hak Anak.	Jumlah Kerjasama/Kemitraan di bidang Pemenuhan Hak Anak.	Provinsi dan Kab/Kota	1 Tahun	250.000.000	APBD		100 orang	300.000.000	APBD
		6	Jambore Anak Sumatera Utara.	Jumlah peserta Jambore Anak di Sumatera Utara.	Provinsi	500 orang	300.000.000	APBD		500 orang	360.000.000	APBD
4		7	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi dibidang Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi dibidang Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.	kab/kota	1 Tahun	100.000.000	APBD		25 kab/kota	120.000.000	APBD
		8	Penguatan Pola Asuh Anak dalam Keluarga (Parenting Skill) di Sumatera Utara	Meningkatnya Pengetahuan Orangtua tentang Pola Asuh Anak dalam Keluarga (Parenting Skill) di Sumatera Utara.	Medan	100 orang	100.000.000	APBD		100 orang	120.000.000	APBD

		9	Advokasi dan penguatan Pembentukan Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak di Sumatera Utara.	Jumlah Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak yang terfasilitasi di Sumatera Utara	kab/kota	1 kegiatan	100.000.000	APBD		1 kegiatan	120.000.000	APBD
		10	Penguatan Forum Anak Daerah Sumatera Utara (FAD Sumut).	Terselenggaranya Operasional FAD Sumut	Provinsi dan Kab/Kota	1 Tahun	350.000.000	APBD		1 Tahun	420.000.000	APBD
		11	Operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Provsu	Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.	Medan	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	120.000.000	APBD
		12	Kerjasama dengan TP. PKK dalam rangka pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi desa/kelurahan percontohan pelaksana PKDRT	Jumlah Desa/Kelurahan percontohan pelaksana PKDRT sebagai pemenang lomba.	Kab/Kota	10 pemenang lomba desa/kelurahan	250.000.000	APBD		10 pemenang lomba desa/kelurahan	300.000.000	APBD
		13	Operasional P2TP2A Provinsi Sumatera Utara	Jumlah korban kekerasan yang difasilitasi melalui P2TP2A	Provinsi dan Kab/Kota	1 Tahun	2.000.000.000	APBD		1 Tahun	2.400.000.000	APBD
		14	Penyusunan berbagai kebijakan terkait perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak	Jumlah dokumen kebijakan terkait perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak	Provinsi	1 kebijakan	120.000.000	APBD		1 kebijakan	144.000.000	APBD
		15	Sosialisasi, advokasi dan fasilitasi bidang pemenuhan hak perempuan dan perlindungan khusus anak	Jumlah peserta Sosialisasi, advokasi dan fasilitasi bidang pemenuhan hak perempuan dan perlindungan khusus anak	Medan	100 Orang	100.000.000	APBD		100 Orang	120.000.000	APBD
		16	Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan data	Jumlah peserta pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan	Medan	68 Orang	150.000.000	APBD		100 Orang	180.000.000	APBD

			kekerasan serta aplikasi e kekerasan	serta aplikasi e kekerasan								
		17	Seminar Perlindungan Hak Pekerja Perempuan	Jumlah peserta Seminar Perlindungan Hak Pekerja Perempuan	Medan	100 Orang	150.000.000	APBD		100 Orang	180.000.000	APBD
		18	Pelatihan Pencegahan dan Penanganan korban Kekerasan	Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Penanganan korban Kekerasan	Medan	150 Orang	250.000.000	APBD		150 Orang	300.000.000	APBD
		19	Peningkatan kapasitas SDM Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kabupaten/kota	Jumlah peserta Peningkatan kapasitas SDM Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kabupaten/kota	Provinsi dan Kab/Kota	165 Orang	250.000.000	APBD		165 Orang	300.000.000	APBD
		20	Pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan bagi Disabilitas Perempuan dan anak	Jumlah disabilitas perempuan dan anak yang mendapat pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan	Medan	100 Orang	250.000.000	APBD		100 Orang	300.000.000	APBD
		21	Rapat Koordinasi perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak	Jumlah peserta rapat koordinasi perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak	Medan	150 orang	120.000.000	APBD		150 orang	144.000.000	APBD
		22	Kerjasama/kemitraan bidang perlindungan perempuan dan anak	Jumlah Kerjasama/kemitraan bidang perlindungan perempuan dan anak	Medan	kerjasama	100.000.000	APBD		kerjasama	120.000.000	APBD
		23	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Kebijakan perlindungan perempuan dan Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.	kab/kota	1 Tahun	100.000.000	APBD		1 Tahun	120.000.000	APBD
		24	Operasional Tim Gugus Tugas Perlindungan Khusus Anak di Sumatera Utara.	Jumlah Dokumen/Kebijakan Daerah dalam Perlindungan Anak di Sumatera Utara.	Medan	1 Dokumen	120.000.000	APBD		1 Dokumen	144.000.000	APBD

PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu Tahun 2017, diharapkan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berjalan dengan baik.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu ini juga menjadi pedoman bagi segenap person Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dibuat dalam memberhasilkan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu dapat tercapai.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Hj. NURLELA, SH, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19621023 198602 2 001**